



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Urgensi Akuntabilitas dan Pengawasan; sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Julia Eva Putri¹, Nevi Yarni², Riska Ahmad³

¹ STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh

² Universitas Negeri Padang

³ Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 201x

Revised Aug 20th, 201x

Accepted Aug 26th, 201x

Keyword:

Akuntabilitas
Pengawas
Bimbingan dan Konseling

ABSTRACT

Akuntabilitas dan supervisi merupakan rangkaian kegiatan manajemen, dalam pengelolaannya dengan supervisi konselor sekolah akan dibantu untuk menjawab semua kegiatan konseling. Konselor sekolah sangat diperlukan untuk menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau masyarakat. Adanya program yang sistematis, memerlukan syarat tertentu untuk dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan memerlukan standar sebagai ukuran keberhasilan atau prestasi yang dicapai oleh konselor sekolah. Pelaksanaan Akuntabilitas dan supervisi yang baik akan membawa implikasi positif bagi konselor (sebagai pemberi layanan) dan institusional (tempat konselor bekerja). Hal ini tercermin dari pengelolaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Julia Eva Putri,
STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
Email: juliaevaputri@gmail.com

Pendahuluan

Eksistensi guru BK di sekolah mengalami tantangan dalam menghadapi kebutuhan siswa yang saat ini berorientasi pada kualitas (Susanto, R; 2016). Untuk itu guru BK harus mampu menata dan melakukan evaluasi diri terhadap akuntabel tidaknya penyelenggaraan layanan BK secara obyektif sebelum pengawas sekolah menagihnya

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting menjadi perhatian guru BK atau para konselor. Karena sebelum melakukan berbagai kegiatan konseling, guru BK atau konselor harus memahami unjuk kerja dan hal-hal yang akan dipertanggung jawabkannya, sesuai dengan standar program BK, dengan demikian diharapkan keberadaan bimbingan dan konseling mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Ada lima premis dasar yang menegaskan istilah tersebut (Gysbers & Henderson, 2006); 1. Tujuan BK bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Artinya; dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan BK harus diarahkan pada upaya membantu siswa dalam pencapaian standar kompetensi dimaksud. 2. Program BK bersifat pengembangan (*based on developmental approach*), yakni; meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang bersifat krisis dan klinis, pada dasarnya fokus layanan BK lebih diarahkan pada usaha memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang membantu siswa untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang mandiri. 3. Program BK melibatkan kolaborasi antar staff (*team building approach*), yaitu program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi bahwa tanggung jawab kegiatan

bimbingan melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah dengan sentral koordinasi dan tanggung jawab ada di tangan konselor yang bersertifikasi (*certified counselors*). Konselor tidak hanya menyediakan layanan langsung untuk siswa, melainkan juga bekerja secara konsultatif dan kolaboratif dengan tim bimbingan yang lain, staf personel sekolah yang lain (guru dan tenaga administrasi), bahkan orangtua dan masyarakat. 4. Program BK dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur. 5. Program BK ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian kinerja program BK.

Latar belakang perlunya akuntabilitas dalam penyelenggaraan program BK oleh konselor sekolah dalam pendidikan adalah didasarkan pada pandangan bahwa sekolah adalah organisasi dengan sistem yang terbuka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks (Susanto, R; 2016). Kemampuan guru BK di sekolah dapat dibuktikan dengan kemampuannya menjawab tuntutan dan tantangan terhadap dunia pendidikan dalam relevansinya dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karenanya dalam menjawab tantangan tersebut hendaknya guru BK dapat mempertanggungjawabkan kapasitas dan kapabilitasnya. Melalui akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan maka diharapkan guru BK secara sistematis dan terencana menggunakan pendekatan yang tepat untuk operasionalisasi program layanan BK di Sekolah. Program layanan BK yang terencana akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelayanan BK yang baik dan benar, efektif dan efisien dalam mengembangkan misi bimbingan dan konseling yang telah disepakati adalah hal yang esensial, sehingga pengakuan dan kepercayaan masyarakat akan bertambah. Apabila akuntabilitas atau pertanggung jawaban BK dilakukan secara periodik dan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, tentu saja keberadaan dari BK merupakan kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat.

Layanan Bimbingan dan Konseling

Menurut Prayitno dan Erman Amti (2004), bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku (Kamaluddin, H; 2011). Sukardi (2008:53-58) menyatakan bidang bimbingan mencakup seluruh upaya bantuan yang meliputi: 1) bidang bimbingan pribadi-sosial, 2) bidang bimbingan belajar, dan 3) bidang bimbingan karir.

Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat, ataupun keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui layanan tersebut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi pokok (Prayitno dan Amti; 2004), yaitu: 1) Fungsi Pemahaman, 2) Fungsi Pencegahan, 3) Fungsi Pengentasan, 4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan. Dalam program bimbingan dan konseling komprehensif terdapat empat komponen pelayanan yang memfasilitasi peserta didik secara sistematis dan terprogram untuk mencapai Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (*standard based guidance and counseling*). Empat komponen layanan BK komprehensif adalah: (1) pelayanan dasar; (2) pelayanan responsif; (3) perencanaan individual; dan (4) dukungan sistem,

Tujuan umum bimbingan dan konseling (Kurniati, E; 2018) yaitu: peserta didik (klien) sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terdahulu. Guru Pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Namun dalam proses pemberian layanan, guru BK seringkali mengalami masalah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Susi Susanti (2016) yang mengungkapkan bahwa guru BK sering mengalami kendala dalam pelaksanaan pelayanan baik itu dalam perencanaan program, pelaksanaan program ataupun evaluasi program.

Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam BK

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “*Accountability*” artinya keadaan untuk dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas disebut juga unjuk kerja (Prayitno 1987), kemudian Gibson & Mitchell dalam Munandir (1996:299), mendefinisikan “akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban untuk sesuatu kepada seseorang dengan konsekuensi yang dapat diramalkan demi kinerja yang dikehendaki dan dapat dipahami dari apa yang dipertanggung jawabkan itu”. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities menegerial pada tiap tingkatan dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian (Bukit, S., & Medan, W. M. B. D. K; 2015). Tiap unit pada suatu organisasi, walaupun yang kecil sekalipun bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang di laksanakan pada bagiannya. Mereka mempunyai beban tugas kegiatan tertentu dan perlu mempertanggung jawabkan kepada pemberi tugas kegiatan tersebut.

Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan untuk memberi pembinaan melalui arahan, bimbingan dan memberi contoh (Purba, S; 2018). Memberikan arahan adalah upaya pengawas sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Memberikan bimbingan adalah upaya pengawas sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi mengetahui lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya. Memberi contoh adalah upaya pengawas sekolah yang dilaksanakan dengan cara pengawas sekolah bertindak atau mempraktekan secara langsung sebagai guru dalam melaksanakan proses pendidikan untuk materi pendidikan tertentu dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan dengan baik model yang dicontohkan itu. Tugas pokok pengawas tersebut di atas, maka peranan pengawas adalah sebagai: inspector, observer, reporter, coordinator, dan performer leadership (Surya Dharma, 2006).

Akuntabilitas merupakan “Rasa tanggung jawab bersama/ *Mutual Accountability*” yang dicirikan dengan tim yang produktif. Pengawas dan guru BK harus menjaga akuntabilitas untuk melaksanakan apa pun yang diperlukan dalam memberikan layanan konseling kepada siswa di sekolah. Katzenbach, J. R. & Smith, D. K. (1993) menemukan bahwa akuntabilitas bersama/ *Mutual Accountability* tidak dapat dipaksakan. Sebaliknya, akuntabilitas muncul dari komitmen dan kepercayaan yang datang dari bekerja bersama menuju tujuan bersama.

Istilah *stakeholders* sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana (Abdiprojo, 2010).

Syarat akuntabilitas dan pengawasan BK adalah:

1. Menentukan tujuan yang tepat
2. Mengembangkan standar yang tepat untuk mencapai tujuan
3. Mempromosikan penerapan pemakaian standar
4. Mengembangkan standar organisasi & operasi secara efektif, ekonomis & efisien.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe/bentuk, diantaranya jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program yaitu mengacu pada pertanggung jawaban berkenaan dari hasil kegiatankegiatan BK yang telah dilaksanakan. Hal ini akan berkaitan erat dengan rencana program yang disusun sebelumnya dan juga akan menampilkan akuntabilitas proses yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan.

2. Akuntabilitas manajemen.

Akuntabilitas manajemen menitik beratkan pada efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan dana, fasilitas, SDM dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas ini menampilkan peranan manajer, bukan hanya dalam menerapkan peraturan yang ada, tetapi juga menerapkan proses yang berkelanjutan, sehingga memungkinkan memberikan pelayanan yang terbaik. Akuntabilitas manajemen ini dapat dirinci lagi menjadi akuntabilitas keuangan, fasilitas, administrasi, dan sumber daya manusia.

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Agar sistem akuntabilitas bimbingan membawa hasil yang di kehendaki ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi (Krumboltz, dalam Gibson & Mitchell, 1981). Hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
2. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien.
3. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.

4. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
6. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
7. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.

Pengawas BK merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pelaksanaan program layanan BK di sekolah, hal ini dikarenakan perannya sebagai kunci dalam kerangka penjaminan mutu dan akuntabilitas sistem pendidikan. Diharapkan pengawas BK dapat menjadi pengelola pendidikan dan sekaligus koordinator BK, yang bertugas untuk memastikan bahwa standar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program BK di sekolah telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dilakukan cara melakukan inspeksi dan evaluasi, memberikan nasehat, bimbingan dan dukungan bagi guru BK dan kepala sekolah.

Kesimpulan

Akuntabilitas dan pengawasan merupakan serangkaian kegiatan manajemen, dalam manajemen, dengan adanya pengawasan guru BK akan terbantu untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan BK termasuk layanan BK di sekolah. Guru BK atau konselor sangat perlu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adanya program yang sistematis, memerlukan suatu kondisi tertentu untuk dipertanggung jawabkan, sedangkan kondisi untuk dipertanggung jawabkan memerlukan standar sebagai ukuran keberhasilan atau prestasi yang dicapai oleh guru BK. Pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan yang baik akan menciptakan implikasi yang positif berkenaan dengan konselor (sebagai orang yang menjadi penyelenggara layanan) dan kelembagaan (tempat konselor bekerja). Hal itu tercermin dalam penatalaksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.

Referensi

- Bukit, S., & Medan, W. M. B. D. K. (2015). Akuntabilitas Dalam Bimbingan dan Konseling. Depdiknas. 2009. *Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Dollarhide, Collete T., Sadinak, Kelli A. 2008. *Comprehensive School Counseling Programs: K-12 Delivery System*. New York: Pearson
- Gibson, Robert L & Mitchell, Marianne H. 1981. *Introduction to Counseling and Guidance*. Second Edition. New York: Mc Millan Publishing.
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2006). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association
- Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan konseling sekolah. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 17(4), 447-454.
- Katzenbach, J. R. & Smith, D. K. 1993. *The Wisdom of Teams: Creating The High Performance Organizaton*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kurniati, E. (2018). Bimbingan dan konseling di sekolah; prinsip dan asas. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 54-60.
- Kurniawan Teguh. 2007. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan. *Power Point Persentation*. Yogyakarta: UGM.
- Prayitno dan Erman Amti. 2004. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Purba, S. (2018). Profesionalisme dan Kompetensi Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Dan Kinerja Sekolah. *GENERASI KAMPUS*, 7(2).
- Schmidt, J. J. (2003). *Counseling in schools: Essential services and comprehensive programs*, 4th ed. Boston, MA.: Allyn & Bacon.
- Suharto, Edi. 2006. Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. *Makalah disampaikan dalam Semiloka Eksistensi Diklat Kesejahteraan di Era Globalisasi*. Jakarta: TKSM
- Surya Dharma. (2006). Kepemimpinan Pengawas Sekolah: Mengembangkan Budaya Tanggung Jawab. Dalam *Jurnal Tenaga Kependidikan*. Vol. 1, No. 2-Agustus, hal. 9.jn
- Susanto, R. (2016). Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jakarta: Eduscience*.
- Susi Susanti. (2016). Hambatan Yang Dihadapi Oleh Guru Bk Dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Perorangan Di Smpn 4 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) PGRI Sumatera Barat, Padang